

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1.Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dengan judul Implementasi Program Keluarga Berencana (KB) di Puskesmas Lurasik Kecamatan Biboki Utara Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai berikut:

1. Komunikasi

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang baik dan efisien memegang peran krusial dalam keberhasilan implementasi program KB di Puskesmas Lurasik. Beberapa poin penting yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:

Komunikasi Langsung oleh Implementor Kepala Puskesmas, kepala program KB, dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) terlibat langsung dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan pesan-pesan terkait program KB disampaikan secara langsung kepada target audiens, sehingga meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang program tersebut.

Kegiatan Sosialisasi yang Terintegrasi Kegiatan sosialisasi program KB dilakukan secara bersamaan dengan kegiatan posyandu. Pendekatan ini memanfaatkan momen pertemuan rutin dengan masyarakat untuk menyampaikan informasi tentang program KB, sehingga memperluas jangkauan dan partisipasi masyarakat dalam program tersebut.

Kesempatan untuk Interaksi Langsung Dengan melakukan komunikasi langsung melalui kegiatan sosialisasi, implementor memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berinteraksi langsung, bertanya, dan memperoleh klarifikasi mengenai program KB. Hal ini dapat meningkatkan tingkat partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam program tersebut.

Dengan demikian, kesimpulan tersebut menekankan pentingnya komunikasi yang efektif dalam mendukung keberhasilan implementasi program KB. Langkah-langkah konkret seperti komunikasi langsung oleh implementor dan integrasi kegiatan sosialisasi dengan kegiatan posyandu dapat menjadi strategi yang efektif dalam meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam program KB di Puskesmas Lurasik.

2. Sumber Daya

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa sumber daya yang memadai sangat penting untuk mendukung pelaksanaan program KB di Puskesmas Lurasik. Beberapa poin penting yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:

Sumber Daya Manusia Ketersediaan tenaga kerja yang terlatih dan kompeten dalam bidang KB sangat diperlukan untuk menjalankan program dengan efektif. Hal ini mencakup keberadaan petugas kesehatan yang terampil, seperti dokter, bidan, dan perawat, yang mampu memberikan layanan KB kepada masyarakat. Anggaran Dukungan anggaran yang memadai dari pemerintah daerah atau instansi terkait penting untuk menyediakan dana yang cukup untuk operasional program KB. Dana tersebut dapat digunakan

untuk pembelian alat kontrasepsi, pelatihan tenaga kerja, kegiatan sosialisasi, dan pemeliharaan sarana prasarana. Sarana Prasarana: Ketersediaan fasilitas dan sarana prasarana yang memadai, seperti ruang konsultasi KB, pusat pelayanan KB, dan alat kontrasepsi, sangat diperlukan untuk memberikan layanan KB secara optimal kepada masyarakat. Sarana prasarana yang memadai juga mencakup teknologi informasi dan komunikasi yang dapat digunakan untuk mendukung monitoring dan evaluasi program. Dengan demikian, kesimpulan tersebut menegaskan bahwa sumber daya yang memadai, termasuk sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana, sangat penting untuk mendukung pelaksanaan program KB. Langkah-langkah untuk memastikan ketersediaan dan pengelolaan sumber daya yang optimal perlu diprioritaskan guna meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program KB di Puskesmas Lurasik.

3. Disposisi.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa sikap dan disposisi para pelaksana program KB memiliki pengaruh signifikan terhadap pelaksanaan program tersebut di Puskesmas Lurasik. Berikut adalah beberapa poin penting yang dapat disimpulkan

Sikap yang Mendukung Kepala Puskesmas dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang memiliki sikap yang positif dan mendukung terhadap program KB cenderung lebih efektif dalam menjalankan tugas mereka. Sikap yang positif ini mencakup komitmen yang tinggi, semangat untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, dan

keyakinan akan manfaat dari program KB. Komitmen yang Tinggi: Komitmen yang tinggi dari para pelaksana program KB, terutama dari kepala Puskesmas dan PLKB, merupakan faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas program. Komitmen ini tercermin dalam dedikasi mereka untuk melaksanakan tugas dengan baik, mengatasi hambatan, dan mencari solusi untuk meningkatkan kualitas layanan KB. Pengaruh Terhadap Motivasi dan Kinerja Sikap dan disposisi para pelaksana juga berdampak pada motivasi dan kinerja mereka dalam menjalankan program KB. Sikap yang positif dan komitmen yang tinggi cenderung meningkatkan motivasi dan kinerja para pelaksana, sehingga berkontribusi pada keberhasilan program secara keseluruhan. Dengan demikian, kesimpulan tersebut menekankan pentingnya sikap dan disposisi para pelaksana program KB, seperti kepala Puskesmas dan PLKB, dalam mempengaruhi keberhasilan program. Langkah-langkah untuk meningkatkan sikap yang mendukung dan komitmen yang tinggi perlu diperhatikan dan didorong guna memastikan efektivitas dan keberlanjutan program KB di Puskesmas Lurasik.

4. Struktur Birokrasi.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa struktur birokrasi yang bertanggung jawab memainkan peran penting dalam implementasi program KB di Puskesmas Lurasik. Beberapa poin penting yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:

Faktor Penting dalam Implementasi Program KB Struktur birokrasi yang bertanggung jawab memiliki pengaruh besar terhadap jalannya program

KB. Ketersediaan struktur yang terorganisir dengan baik dapat memberikan landasan yang kuat untuk pelaksanaan program secara efektif. Kemudahan Akses Ketersediaan akses yang mudah terhadap sumber daya, informasi, dan dukungan dari berbagai instansi terkait sangat penting untuk kelancaran program KB. Dengan memastikan bahwa semua pihak terlibat memiliki akses yang memadai, proses implementasi dapat berjalan lebih efisien.

Koordinasi Antarinstansi Koordinasi yang baik antara berbagai instansi terkait, seperti pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan lembaga terkait lainnya, merupakan kunci dalam memperlancar jalannya program KB. Kolaborasi yang efektif antarinstansi dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya, mengurangi tumpang tindih, dan meningkatkan efisiensi pelaksanaan program.

Dengan demikian, kesimpulan tersebut menegaskan pentingnya struktur birokrasi yang bertanggung jawab dalam implementasi program KB. Langkah-langkah untuk meningkatkan kemudahan akses dan koordinasi antarinstansi perlu diprioritaskan guna memastikan kelancaran dan keberhasilan program KB di Puskesmas Lurasik.

5.2.Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas mengenai Implementasi Program Keluarga Berencana (KB) di Puskesmas Lurasik kecamatan Biboki Utara terdapat beberapa saran yang akan disampaikan sebagai berikut:

1. Kepada kepala puskesmas dan juga penanggung jawab KB di Puskesmas Lurasik peneliti menyarankan bahwa teruskan meningkatkan sosialisasi ke

masyarakat terkait program KB agar masyarakat lebih sadar lagi akan pentingnya program keluarga berencana.

2. Kepada masyarakat diharapkan untuk melibatkan diri dalam kegiatan dan hadir dalam sosialisasi sehingga bisa mengerti tentang kegiatan yang di sampaikan oleh kepala Puskesmas, kepala program KB dan PLKB.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukur.M.1988. *Perkembangan Studi Implementasi*. Lembaga Administrasi Negara RI. Jakarta
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-dasar Kebijaksanaan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Agustino, Leo.2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Cv. Alfabeta.
- Anselm, Strauss dan Juliet Corbin. (2003). "*Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*". Yogyakarta : Pustaka Belajar. Skripsi. Sumatera Utara: Sumatera Utara university press.
- Ariani, Desi, Tahun 2018.Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana Di Desa Percut Kecamatan Percut Tuan Kabupaten Deli Serdang
- BKKBN. (2020). *Strategic Plan BKKBN 2020-2024 (May First)*. BKKBN.
- BP2KB;2014. *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014*; Kefamenanu
- Cairney, Paul.2012. *Memahami Teori dan Permasalahan Kebijakan Publik*. Basstok. Epalgrave
- Dunn, William. 1999. *Analisis Kebijakan*. Diterjemahkan Drs. Samodra Wibawa, Ma Dkk. Jakarta.
- Elsa Setiawati. S (2017). *Persepsi Masyarakat Terhadap Program Kampung KB Di Kelurahan Pantoloan Boya Kecamatan Tawaeli Penerbit : E- Journal Geo-Tadulako UNTAD*
- Esterberg, Kristin G,2002 ; *Qualitative Methods Ins Social Research*, Mc Graw Hill, New
- Mega and Wijayanegara. 2017. *Asuhan Kebidanan Keluarga Berencana*. CV. Trans Info Media. Jakarta.
- Nasution, 1998. *Metode penelitian naturalistik kuatalitatif*. Bandung: Tarsito
- Nintrafil, Linda. 2018.*Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana: Studi pada RW 06 Kampung Mekarlaksana Deca Citaman Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung [skripsi]*. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati; Bandung:

Nosa ,B.A & Sri,W.2017.*Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana di Dusun Ambeng-ambeng Desa Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo*.Jawa Timur.

Purwoastuti & Walyani. 2015. *Ilmu Obstetri & Ginekologi Sosial untuk Kebidanan*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press

Saifuddin, Abdul Bari. 2006. Buku Panduan Praktis Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal, Jakarta: Yayasan Bina Sarwono Prawirohardjo.

Siswosudarmo H.R., Anwar H.M., dan Emilia O., 2001, *Teknologi Kontrasepsi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Sugiyono, 2013, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. (Bandung: ALFABETA)

Suratun, S. Heryani, & Manurung, S., 2008, *Pelayanan Keluarga Berencana dan Pelayanan Kontrasepsi*, Jakarta: Trans Info Media

Triyanto,L.,&Indriani, D. 2019.Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Jenis Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (Mkjp) Pada Wanita Menikah Usia Subur Di Provinsi Jawa Timur. *The Indonesian Journal of Public Health*,13(2), 246.<https://doi.org/10.20473/ijph.v13i2.2018.246-257>

Wahab, Solichin Abdul. 2001. Analisis Kebijaksanaan, dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Edisi Kedua. Penerbit Bumi Aksara: Jakarta

Widodo,J. 2021. Analisis Kebijakan Publik:Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik. In Media Nusa Creative.

Zaeni, Akhmad. (2006) *Implementasi Kebijakan Program Keluarga Berencana di Kabupaten Batang Studi Kasus Peningkatan Kesertaan KB Pria di Kecamatan Grinsing*, Tesis Magister Administrasi Publik, Universitas Diponegoro, Semarang. Universitas Diponegoro

Sumber lain

Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 *tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga*.

Perundang – Undangan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 *tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga*.